

KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN KETERKAITAN WILAYAH

Oleh : Tjipto Hartono

ABSTRACT

The stipulation of Law No.32, 2004 is a revision of Law No. 22, 1999 that arrange the hierarchy relation of provincial government with municipality/regencies, in which the provincial government coordinate development planning and various inter region regulations, for the benefit of inter regional cooperation conducive for regional and national development. Moreover, regional policy could be developed into regional management and regional marketing, for better inter regional development. Regionalization could be well implemented with the absence of local egoism, cultural adjustment, cooperation needs, mutual interest, as well as facility support.

Keywords: *regional development, regional management, regional marketing.*

A. PENDAHULUAN

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Revisi atas UU No. 22 Tahun 1999) tentang otonomi daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat lebih baik memberikan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan masa lalu. Salah satu konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatnya upaya masing-masing pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerah dengan menarik dan mengembangkan investasi. Bagaimana pemerintah daerah berupaya memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan saat ini.

Di satu sisi kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat membuat

daerah lebih mandiri dan berinisiatif dalam mengembangkan perekonomian daerah. Namun disisi lain otonomi daerah dapat pula menyuburkan egoisme lokal yang kontra produktif bagi perekonomian nasional. Kesadaran pemerintah daerah yang berlanjut pada inisiatif regional dalam rangka pembentukan *regional management* akan menjadi kebutuhan bersama. Langkah selanjutnya perlu adanya *regional marketing* yang dapat dijadikan sebuah instrumen pembangunan nyata yang efektif, sehingga perlu adanya konsep koordinasi dan kerjasama yang sesuai dengan tradisi masyarakat, yaitu musyawarah.

Regional management sebagai *platform* dari berbagai kepentingan justru dapat memberikan

kontribusi/solusi yang inkonvensional terhadap berbagai permasalahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus mengantisipasi permasalahan globalisasi.

Egoisme lokal dan keterbatasan kemampuan daerah tidak akan dapat menekan produksi biaya tinggi yang semakin dituntut dalam alam persaingan global dan sekaligus semakin mempersulit menjangkau peluang-peluang usaha baru. Dengan demikian kerjasama dan koordinasi menjadi bagian yang sulit untuk dipisahkan dalam menghadapi pembangunan di masa mendatang dan sesungguhnya telah menjadi suatu kebutuhan.

Sasaran regionalisasi juga dapat membahas permasalahan umum maupun sektoral, seperti proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan beberapa daerah otonom (antar kabupaten/kota atau antar propinsi), seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) atau jalan tol. Dalam hal ini keterkaitan regional terjalin atas kesamaan kepentingan melalui suatu wadah kerjasama dan koordinasi antar daerah terkait.

B. PEMBAHASAN

1. Kerjasama Antar Daerah Sebagai Upaya Prospektif Dalam Pembangunan Daerah.

Indonesia saat ini sedang berada pada masa transisi, yaitu perubahan dari iklim politik dan pemerintahan yang monolitik dan sentralistik menuju ke arah yang lebih demokratis dalam pelaksanaan

otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terwujud bila sistem pelayanan publik yang ada direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu dan adaptif terhadap tuntutan masyarakat dengan penerapan desentralisasi pembangunan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan asas desentralisasi pembangunan agar tidak menemui hambatan adalah :

- a. Adanya keterkaitan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang mensyaratkan perencanaan pembangunan yang komprehensif;
- b. Adanya keterbukaan dalam segala aspek pembangunan sehingga masyarakat mengetahui program apa yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- c. Perlunya partisipasi masyarakat;
- d. Perlunya perencanaan yang strategis dan matang merupakan cara untuk meningkatkan kualitas daerah.

Perubahan format pemerintah daerah membawa pengaruh besar terhadap wujud, struktur, kultur, dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan bentuk susunan pemerintah daerah membawa konsekuensi pula

terhadap perubahan kedudukan, kekuasaan, dan wewenang kepala daerah propinsi sebagai daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi. Kewenangan propinsi secara garis besar mencakup tiga kewenangan :

- a. Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta bidang pemerintah tertentu lainnya, yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 25 Tahun 2000 sebanyak 108 kewenangan;
- b. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota;
- c. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Memperhatikan dari kewenangan-kewenangan tersebut maka kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota merupakan peran propinsi. Pemikiran penulis bahwa fungsi pemerintah propinsi akan lebih efektif jika dikelola di tingkat sub-propinsi (*region*) dengan anggota lima sampai enam kabupaten/kota, tampaknya lebih realistis untuk diberlakukan saat ini dalam bentuk *regional management*. Namun pengelolaan *region* atau *regional management* sebaiknya dikelola oleh orang-orang profesional yang memiliki jiwa kewirausahaan, bukan seorang birokrat.

Regional management yang telah terbentuk dan eksis dengan kegiatannya saat ini adalah *regional management* BARLINGMASCA-KEB (Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen), sedangkan yang lainnya seperti SUBOSUKOWONO-SRATEN, KEDUNGSAPUR, Sapta Mitra Pantura (Sampan), BANJAR KEBUKA, Forum Rembug Rawa Pening masih embrio dan dalam proses.

Melihat berbagai kendala dan permasalahan pembangunan di Indonesia saat ini, maka perlu adanya sebuah terobosan baru dalam upaya menggalang kekuatan pembangunan di daerah. Dimana upaya ini harus sesuai dan mencerminkan semangat, situasi, dan kondisi nyata yang ada di masyarakat. Salah satu inovasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten dan kota saat ini adalah konsep *regional management*. Keberadaan kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota merupakan terobosan penting dalam pengembangan ekonomi regional. Hal ini didasari adanya latar belakang bahwa daerah tidak terikat oleh batasan wilayah administratif seperti masa lalu.

Ciri khas dari pelaksanaan konsep *regional management* atau yang dapat disebut sebagai wahana komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar daerah ini adalah aspek "Komunikasi, Kerjasama, dan

Koordinasi” (3K) dalam pembangunan antar daerah dalam suatu kesatuan wilayah yang disepakati bersama. Bentuk kerjasama dan koordinasi yang lahir dari kebersamaan kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan tersebut harus terjadi atas dasar pendekatan *win-win solution* bagi setiap daerah yang terkait. Hal ini dapat terjadi karena karakteristik kerja *regional management* yang khas, yaitu menitikberatkan pada pemanfaatan sinergi sumber daya dan potensi lokal.

Keberhasilan dan pengalaman positif pemanfaatan regional management sebagai instrumen pembangunan di negara-negara yang telah lama menerapkan pendekatan desentralisasi, semakin menumbuh kembangkan *know how* mengenai strategi pembangunan ini. Adapun bentuk dan tugas *regional management* yang digunakan tergantung dari tujuan dan keperluan pembangunan itu sendiri, seperti misalnya di sektor pariwisata, infrastruktur, pembangunan jalan tol dan pengelolaan daerah aliran sungai yang melintasi beberapa wilayah administratif serta di sektor ekonomi : pelaksanaan konsep *regional marketing/pemasaran wilayah* yang melibatkan beberapa daerah dalam suatu konsep kesatuan wilayah.

2. Kerjasama Antar Daerah Dan Keterkaitan Wilayah

Berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Tengah ditetapkan 8 kawasan andalan yang merupakan kawasan strategis pengembangan wilayah. Namun dalam pengembangan potensi daerah kawasan ini masih belum mencapai hasil optimal, sebab penetapan kawasan tersebut hanya sebatas penetapan batas fisik administrasi semata seperti halnya konsep Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) tanpa diikuti dengan suatu pendekatan manajemen pembangunan. Padahal semestinya sistem manajemen inilah yang akan merealisasikan berbagai peluang keterkaitan dan sinergi dalam pengelolaan potensi dan aset daerah. Di samping itu sistem ini pula yang akan menjadi instrumen kerjasama pembangunan antar daerah dalam rangka mendorong perkembangan kawasan secara keseluruhan.

Pembentukan manajemen wilayah (*regional management*) merupakan suatu kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama pembangunan. Konsep ini tidak hanya difokuskan pada satu sektor saja tetapi disesuaikan dengan potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah. Fokus *regional management* adalah sinergi pembangunan antar daerah dengan memberdayakan potensi ekonominya. Apabila melihat konteks Jawa Tengah maka sebenarnya wilayah ini cukup strategis sebagai pusat produksi,

koleksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa. Secara alami wilayah ini memiliki keuntungan geografis karena menghubungkan dua pusat pertumbuhan nasional yaitu, Jakarta yang melayani kawasan barat dan Surabaya yang melayani kawasan timur Indonesia. Namun wilayah ini relatif tertinggal jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi tetangganya, dengan demikian pemasaran wilayah menjadi isu strategis dalam setiap upaya pembangunan daerah Jawa Tengah yang salah satunya dengan konsep *regional management BARLINGMASCAKEB*.

Sebagaimana disinggung di depan, orientasi pembangunan ekonomi daerah dilakukan tidak mengejar pertumbuhan semata, namun juga dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah.

Pendekatan sektoral yang ditempuh selama ini, khususnya dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi sosial dan daerah, telah ikut memberikan dampak berupa kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota dan propinsi, dan masih terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Untuk itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah tidak lagi tepat jika hanya dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata, namun juga harus mempertimbangkan karakteristik

potensi dan permasalahan yang ada pada wilayah atau daerah. Dari sisi perekonomian daerah upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah harus dilakukan secara terpadu dan sinergis. Dimasa mendatang perencanaan kebijakan dan program pembangunan ekonomi dilandasi oleh pemahaman yang lebih komprehensif, yaitu :

- a. Pembangunan ekonomi daerah tidak lagi bersifat *sectoral approach*, tetapi menggunakan pendekatan kawasan sesuai tata ruang maupun keunggulan lokal berdasarkan kemitraan dan sinergitas antar wilayah dan antar pelaku;
- b. Pembangunan ekonomi daerah bukan lagi penjumlahan (*agregative*) masing-masing sektor secara terpisah, tetapi didasarkan pada kebutuhan wilayah secara utuh yang di-*breakdown* kedalam spesifikasi masing-masing program secara jelas (*action oriented*);
- c. Pembangunan ekonomi daerah menekankan pada kerjasama dan sinergitas antar daerah dan antar pelaku berupa komitmen untuk bekerjasama secara sinergis sesuai potensi yang ada.

Harus diakui bahwa di masa lalu perencanaan pembangunan sangat sentralistis dan kurang membuka peluang bagi daerah untuk melakukan perencanaan yang penuh dengan inisiatif, kreativitas, dan inovatif. Berbeda dengan sekarang

sejak pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Revisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah), maka perencanaan pembangunan ekonomi daerah di era otonomi daerah memerlukan inovasi-inovasi agar daya saing dapat lebih diciptakan melalui pendekatan sinergis. Untuk itu perlu dilaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang dialogis dan partisipatif, melalui konsep pemasaran wilayah (*regional marketing*) agar sinergitas, perencanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat diciptakan, tidak lagi semata-mata penjumlahan total pendekatan sektoral.

Pendekatan *regional management* adalah suatu konsepsi pengembangan wilayah dengan menitikberatkan pada kerjasama strategis (*strategic alliance*) antar daerah dalam lingkup *special geografis* (kawasan).

Perencanaan berbasis kawasan sangat strategis dalam konteks memacu pembangunan ekonomi daerah yang berbasis kerjasama antar daerah. Pendekatan ini disebut *Regional economic development strategic programmes* (REDSP), yang dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategis untuk mengembangkan sumber daya ekonomi yang berbasis pada unggulan dan karakteristik *region*, didukung oleh sinergitas program dan kemitraan yang bersifat lintas daerah serta lintas pelaku.

Pola REDSP di Jawa Tengah ini adalah merupakan *pioneer* kebijakan pembangunan kewilayahan di Indonesia dikarenakan telah terbukti keberhasilannya dalam bersinergi antar eksekutif dan *stakeholder* dilintas kabupaten/kota guna mendorong dan mengoptimalkan potensi daerah. Melalui REDSP maka potensi dan peruntukan kawasan sebagaimana dituangkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) baik propinsi maupun kabupaten/kota dapat disinkronisasikan dan diisi dengan program-program sektoral yang ada pada dinas tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga RTRW tidak lagi sekedar dokumen yang bersifat *dead paper* karena tidak didukung atau diisi dengan komitmen dan program-program yang jelas.

Dalam konteks ini tidak ada lagi unsur pemerataan anggaran, tetapi semangatnya adalah bagaimana anggaran dapat diarahkan untuk menggerakkan inisiatif regional dalam rangka memasarkan wilayahnya secara sinergis dan kompetitif. Peran aktor regional sangat penting dalam menggerakkan kerjasama yang dibentuk untuk memasarkan potensi antar daerah, tugasnya cukup berat karena harus mampu membangun komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar daerah dalam memasarkan potensi wilayah secara profesional.

Beberapa contoh konkrit pendekatan REDSP di Jawa Tengah adalah kerjasama antar kabupaten/

kota BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen), SUBASUKAWANASRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung), Banglor (Rembang dan Blora), WANARAKUTI (Juwana, Jepara, Kudus, dan Pati), KEDUNGSAPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi), TANGKALLANGKA (Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kajen) dan BREGAS (Brebes, Tegal, dan Slawi) dan contoh lain yang merupakan implementasi dari kerjasama antar daerah yaitu pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran pemasaran potensi daerah dan pembangunan wisata terpadu antar daerah.

Proses regionalisasi dapat berjalan baik bila didukung oleh berbagai faktor internal. Salah satu faktor yang mendukung adalah kesamaan budaya. Seperti yang terjadi di BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) yang terbentuk atas keragaman budaya Banyumasan. Secara kultur historis kesamaan ciri demografis ini mewariskan "ikatan kekeluargaan" yang semakin memperkuat kemauan di antara kelima daerah untuk memajukan kepentingan bersama.

Peluang pengembangan institusi *regional management* di antara lima daerah juga dibentuk

karena adanya keeratn hubungan geografis dan kesamaan kondisi ekologis. Secara geografis kelima daerah terletak di antara pengaruh struktur permukaan tanah perbukitan (Pegunungan Tengah) dan daerah landai (pantai selatan). Konsekuensinya, kelima daerah memiliki keterkaitan daerah hulu dan hilir yang sangat kuat. Kondisi ini mendorong kebutuhan kerjasama yang solid dalam pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam seperti dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi kawasan lindung. Di samping itu keberadaan pantai selatan tidak sekedar membutuhkan kepedulian bersama dalam melindungi kawasan pesisir terhadap abrasi laut dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menawarkan keuntungan strategis dalam pemanfaatan potensi perikanan laut, wisata bahari, dan pemanfaatan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang perdagangan ke perairan nasional dan internasional.

Faktor penting berikutnya adalah adanya kesamaan basis perekonomian pertanian dan keeratn hubungan sosial-ekonomi antar masyarakat kelima daerah. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat dan kontribusi PDRB terbesar kelima daerah adalah berbasis pertanian. Luasnya lahan persawahan yang dimiliki dan besarnya potensi kelautan yang terpendam membentuk karakteristik masyarakat yang relatif seragam. Hal ini merupakan modal besar sekaligus

tantangan untuk mengarahkan pengembangan produk-produk pertanian menjadi lebih inovatif, integratif, dan kompetitif. Potensi ini juga didukung adanya pola keterhubungan antar masyarakat yang sudah mapan. Hal ini terlihat dari aliran perdagangan di antara kelima daerah yang sangat intensif dan semakin kuat dari waktu ke waktu.

Potensi keterkaitan di antara kelima daerah juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang saling melengkapi. Prasarana perhubungan jalan telah menghubungkan kelima daerah, sehingga mobilitas manusia, barang dan jasa, serta informasi dapat berjalan lancar. Hanya saja fakta di lapangan menunjukkan di beberapa lokasi terdapat kondisi sistem transportasi yang buruk dan belum menjangkau desa-desa yang terisolir, khususnya di desa-desa tertinggal. Kondisi ini justru menjadi "pekerjaan rumah" bagi kelima daerah yang difasilitasi oleh *regional management* untuk mencari terobosan-terobosan baru untuk mengaitkan potensi desa-desa tersebut ke dalam sistem perdagangan antar wilayah. Apabila potensi-potensi tersebut sudah saling terkait, maka peran pelabuhan udara dan laut yang terdapat di wilayah ini menjadi sangat penting untuk memasarkan produk unggulan tersebut ke dalam sistem perdagangan yang lebih luas.

Unsur kesamaan dan keberagaman potensi yang dimiliki wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyu-

mas, Cilacap, dan Kebumen tersebut akhirnya mendorong mereka untuk membentuk *regional management* dan *regional marketing* yang diawali dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembentukan *regional manajemen* dan *regional marketing* untuk Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen oleh para bupati di kelima daerah tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2002 di Purwokerto.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengembangan wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah;
- b. Kesenjangan antar wilayah;
- c. Kurangnya sinergitas pembangunan antar wilayah;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah;
- e. Pelaksanaan pembangunan masih parsial;
- f. Belum keseluruhan memiliki rencana pengembangan;
- g. Fleksibilitas rencana kurang dapat mengikuti dinamika pembangunan;
- h. Konflik kepentingan karena adanya pemahaman yang berbeda;
- i. Inkonsistensi dalam implementasi.

C. PENUTUP

Perkembangan pembangunan saat ini menunjukkan, bahwa hanya konsep pembangunan berkualitas dan tepat sasaranlah yang akan

memperoleh dukungan dan dapat diterima oleh masyarakat. Untuk memperoleh konsep berkualitas dan tepat sasaran dibutuhkan tenaga profesional dengan kemampuan organisasi dan komunikasi khusus. Partisipasi para ahli ini tentu dapat berdampak pada peningkatan SDM pihak terkait, karena dalam prosesnya *regional management* selalu dibarengi dengan *know how transfer*.

Salah satu peluang penerapan konsep *regional management* terletak pada sifat dan orientasi komunikatif yang menjadi ciri khasnya. Justru karena ruang gerak kompetensi tidak kaku, maka dapat melahirkan bentuk-bentuk solusi baru (*non-konvensional*) bagi pemecahan masalah daerah, regional bahkan hingga nasional.

Keberhasilan *regional management* dalam menangani proyek-proyek pembangunan tergantung dari seberapa besar partisipasi dan iklim komunikasi kondusif yang tercipta antar pihak terkait. Pengalaman kerjasama antar instansi sektoral, lintas sektoral dan antar daerah dapat menambah wawasan para pihak terkait, karena dapat melihat permasalahan dari sisi yang beragam.

Melalui konsep *regional management* juga dapat menjawab kekhawatiran disintegrasi, karena dengan pengalaman kerjasama lintas administratif serta komunikasi yang terbina dapat membantu menekan kepentingan sesaat daerah, sebagai implikasi negatif

dari penerapan otonomi daerah. Praktek transparansi pada proses pelaksanaan konsep membuka segala permasalahan wilayah dan dengan demikian setiap daerah dapat lebih memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini akan lebih memberikan suasana keterbukaan dan saling pengertian antar daerah, baik sektoral maupun administratif, sehingga meredam kecurigaan dan “egoisme daerah” yang kontra produktif bagi pembangunan nasional.

Tradisi musyawarah yang mengakar pada budaya komunikasi di masyarakat pada umumnya, merupakan landasan kuat bagi keberhasilan pelaksanaan *regional management* di Indonesia. Dengan demikian menggali dan mengembangkan *regional management* yang didukung oleh semua pihak merupakan sebuah upaya yang layak untuk segera ditindaklanjuti.

Melalui konsep *regional marketing* atau pemasaran wilayah terbuka peluang pemanfaatan potensi daerah melalui sinergi pemberdayaan. Dengan ‘kebersamaan’ terbentuk kekuatan sumber daya yang memperbesar peluang dalam mencapai target-target pembangunan daerah. Melalui pemasaran wilayah beban keuangan daerah yang sedianya dipikul sendiri dapat ditangani wilayah beban keuangan daerah yang sedianya dipikul sendiri dapat ditangani bersama dalam konteks kebersamaan kepentingan. Pentingnya

sebuah citra wilayah saat ini telah menjadi bagian dari salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu pemasaran wilayah merupakan komponen penting dalam strategi pembangunan dimasa mendatang.

Peran pemerintah propinsi dalam era desentralisasi dapat diwujudkan dalam pembentukan *regional management*. Kehadiran *regional management* diharapkan akan membantu dalam percepatan pembangunan melalui pengembangan jaringan pasar dan investasi diprioritaskan dalam rangka pengembangan potensi unggulan wilayah.

Peran serta berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk didalamnya dinas propinsi dan kabupaten/kota, DPRD, badan penanaman modal, pengusaha, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat sangat diharapkan sehingga tercipta iklim investasi dan semangat kewirausahaan yang tinggi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. H. Djasri, ST, MM. 2005. "Konsep dan Pelaksanaan Regional Management BARLINGMAS-CAKEB". Makalah yang disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Kemitraan Daerah di Dierjen

Pembangunan DEP DAGRI. Jakarta, 21 Februari 2005.

Marsono. 1999. *Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Djambatan.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Visi dan Misi.

Program RED SP Gubernur Jawa Tengah dalam pengarahannya tanggal 24 Juli 2004 di BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA. 2004. *"Regional Management & Marketing"*. MPWK, Program Pascasarjana UNDIP Semarang.

Ragil Haryanto, Benjamin Abdurahman, Asep Arofah Permana, Hari Adi Agus Setiawan. 2003. *"Regional Management dan Regional Marketing : Strategi Pembangunan Daerah dan Tantangan Globalisasi"*. Curdes Center for Urban & Urban Regional Development Studies Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP Semarang.

Suwarno, P.J. 2000. *"Demokrasi desa di Indonesia : melacak akar dan sejarahnya"*, dalam Dadang J.

- (penyunting), Arus bawah Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Utomo, Warsito. 2000. Makna Otonomi Daerah. Tulisan dalam Bahan Ajar Diklat Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) yang diselenggarakan Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan OTO Bappenas.